

**AKUNTABILITAS DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBKAU (DBH CHT)
PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2012**

**(Studi Pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Pemerintah Kota Prabumulih)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**AYU TRIAS OKTARIA
07081001009**

Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2015**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Trias Oktaria

NIM : 07081001009

Dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya. Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Sriwijaya kepada saya.

Inderalaya, Februari 2024



Ayu Trias Oktaria

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**AKUNTABILITAS DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBKAU (DBH CHT)
PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2012**

**(Studi Pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Pemerintah Kota Prabumulih)**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

**AYU TRIAS OKTARIA
07081001009**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2015

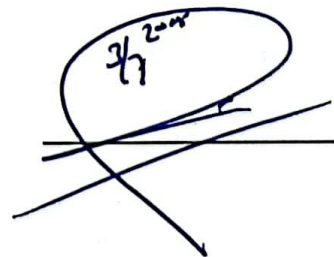
Pembimbing I

**Dr. Lili Erina, M.Si.
NIP. 196612301992032001**



Pembimbing II

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**AKUNTABILITAS DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU (DBH CHT)
PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2012**

**(Studi Pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Pemerintah Kota Prabumulih)**

SKRIPSI

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal Juli 2015
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**


TIM PENGUJI SKRIPSI


Dr. Lili Erina, M.Si.
Ketua

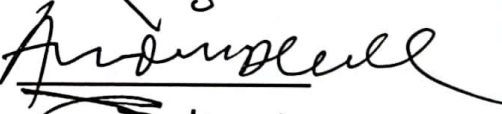
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
Anggota


Dr. Andy Al Fatih, MPA
Anggota

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
Anggota











PERSEMBAHAN

MOTTO

- ☉ *Kuliah itu bukan balapan lulus atau tinggi – tinggian IPK, tetapi yang harus diperjuangkan adalah sabar, ikhlas dan syukur dalam menjalani dengan tanggung jawab serta versi terbaik menurutmu.*
- ☉ *Keindahan sesungguhnya sulit untuk terasa oleh mata, namun ketika mata dipejamkan dan hati yang bergerak merasakan. Itulah keindahan yang sesungguhnya dan yakinlah dengan impianmu bahwa akan terwujud walau melalui proses yang sulit. (PutraDiansyahQuote)*

Ku persembahkan kepada :

- a. Mama dan Papa tercinta*
- b. Keluarga dan Sahabat*
- c. Kesayanganku Putra Diansyah*
- d. Pendidik dan almamaterku*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Kota Prabumulih. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Kota Prabumulih tidak akuntabel yaitu terjadi kesalahan alih fungsi dana karena Kota Prabumulih bukan termasuk daerah penghasil tembakau dan bukan lingkungan industri tembakau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, sedangkan kualitatif maksudnya prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan interpretasi data dan hasil wawancara, menunjukkan bahwa pengelolaan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak akuntabel, hal ini diukur dari dimensi integritas keuangan, dimensi pengungkapan laporan keuangan dan dimensi ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Oleh karenanya untuk menciptakan adanya akuntabilitas keuangan dalam penggunaan dana dan untuk menghindari terjadi kesalahan alihfungsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), sebaiknya adanya kejujuran dari pemerintah dalam bersosialisasi dalam menggunakan danam kemudian laporan keuangan lebih tranfaransi, serta rincian kegiatan yang lebih akurat yang tertera di peraturan untuk penggunaan alokasi dana untuk daerah yang bukan penghasil tembakau dan bukan lingkungan industri tembakau.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

Pembimbing I



Dr. Lili Erina, M.Si.
NIP. 196612301992032001

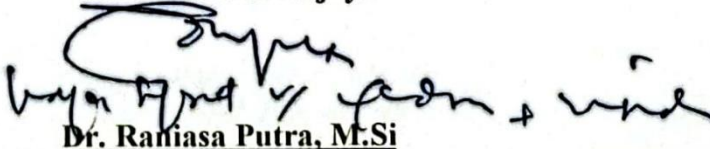
Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, Juli 2015

**Ketua Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. Raniasa Putra, M.Si
NIP. 19780512 200203 1 003

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the accountability of Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) at the Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Government Prabumulih. Used of Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) in the Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Prabumulih unaccountable government that errors occur over the functions of the funds because Prabumulih not including tobacco-producing areas and not the tobacco industry environment. The method used in this research is descriptive qualitative research methods. Descriptive of making comparisons or connect with other variables, whereas qualitative research procedures that produce meaning descriptive form of words written or spoken of the people and observed behavior. Based on the interpretation of the data and interviews, showed that pengelolaan in the use of Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) unaccountable, it is measured from the dimensions of financial integrity, financial statement disclosure dimension and the dimension of the observance of laws - laws. Therefore to create financial accountability in the use of funds and to avoid an error occurred fungsional shift of Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), preferably the honesty of the government in using Danam then socialize in more tranfaransi financial statements, as well as details of activities that are more accurate listed in the regulations for the use of the allocation of funds to areas that are not producing tobacco and not the tobacco industry environment.

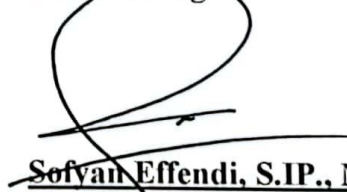
Keywords: *Accountability, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)*

Pembimbing I



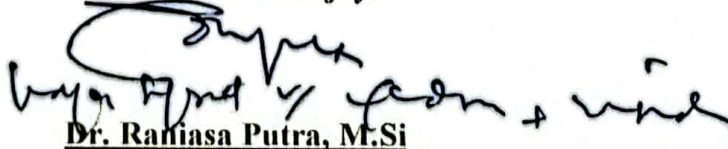
Dr. Lili Erina, M.Si.
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, Juli 2015
Ketua Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Raniasa Putra, M.Si
NIP. 19780512 200203 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat hingga umatnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Alhamdulillah berkat izin dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Akuntabilitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Pada Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2012 (Studi Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Kota Prabumulih)”. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak. Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Dra. Martina, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu.
5. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan arahan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan dan arahan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen FISIP Administrasi Negara yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu diperguruan tinggi Universitas Sriwijaya.
8. Kak Bowok selaku staff di kampus Fisip Unsri Indralaya yang telah banyak membantu penulis.

9. Seluruh Divisi dan Staff Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutan Pemerintah Kota Prabumulih (Bapak Yen Morfi dan Mbak Ita) yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan telah memberikan banyak bantuan selama proses penyelesaian penelitian ini.
10. Kedua Orang Tuaku tercinta yang telah memberikan kepercayaan, kekuatan, dan semangat untuk berjuang hingga akhir. (Mama dan Papa maafkan anakmu untuk penantian kalian yang begitu panjang).
11. Seseorang teristimewa yang selalu menjagaku dan mendampingi dengan cinta, usaha, waktu, biaya serta do'anya yang selalu membuatku kuat dan tetap kokoh terima kasih untuk semuanya MyPutraDiansyah, maafkan aku untuk lelahmu dengan penantian yang begitu panjang.
12. Adik - adik tersayangku, Devi Fitrianty terimakasih semangat dan kasih sayangnya serta maaf yang terkadang menjadi sasaran amarah ayuk dan Gerry Diansyah buat bantuan motivasi dan terimakasih buat laptopnya yang sudah banyak membantu, serta kesayanganku Alisha Sri Hartati untuk semuanya terima kasih.
13. Saudara saudariku sekaligus sahabatku Mas Andy untuk do'a dan bantuan warnetnya serta Utet, Angga, Kak Iko dan Galih CLP untuk dukungan kalian semua.
14. Saudara saudariku Rama Selection (Kak Ojik, Kak Empi , Kak Abeck, Cheto, Bang Akbar, Kak Hakiki, Kak Joko, Didi, Arif, Kak Romi, Kak Yudi, Adek Iun, Tya, Bunga dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu) terima kasih do'a dukungan dan bantuan kalian yang begitu berarti.
15. Terimakasih untuk semua keluargaku yang sudah banyak membantu (Yuk Iin, Aak, Dikky, Mama dan Papa Kiki) dan mbak dian serta sahabat terbaikku Avel Lora untuk semangat dan do'amu selalu.
16. Sahabat – sahabatku Maya, Jeany, Firza, Tiwi, Dikka, CegTa, Cece Riska, dan Melsy yang sudah lebih dulu mendapat gelar S.IP.
17. Terimakasih Ayu Hazarina Halim atas kebersamaannya sahabatku yang selalu ada dan setia menemaniku dengan waktumu yang berharga dengan menerima amarah dosen bersama yang membuat kita stress dan memikirkan hal – hal gila sambil makan begadang dan belanja dengan keuangan yang minim serta dengan tidur alakadarnya yang ditampung emi.

18. Terimakasih Emi yang selalu memberikan tumpangan tempat tinggal serta do'a dan usahamu yang selalu memberiku semangat.
19. Terimakasih sahabat seperjuanganku dari awal perkuliahan hingga menjadi angkatan akhir Weldy Ade Saputra untuk kebersamaannya dalam pemikiran hingga perjalanan menuju kampus dan dosen.
20. Sahabat-sahabat seperjuangan akhirku : Okta, Ishak, Arodian, Herisky, dan Putak semoga status mahasiswa 7 tahun berjuang bukan menjadi penghalang kita untuk nantinya bertemu lagi dalam keadaan yang sudah sama-sama sukses.
21. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta berbagi pengalaman dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan hati yang terbuka. Semoga segala bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal soleh dan mendapatkan ridho Allah SWT. Sehingga pada akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan dilingkungan Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Indralaya, Juli 2015

Penulis

Ayu Trias Oktaria

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
1. Tujuan	7
2. Manfaat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2 Landasan Teori	8
3. Akuntabilitas Keuangan Negara	8
4. Macam – Macam Sumber Keuangan Negara	9
3 Teori Akuntabilitas	12
4 Teori Akuntabilitas yang Digunakan dalam Penelitian	23
5 Kerangka Teori	26
6 Kerangka Pemikiran.....	27
7 Penelitian Terdahulu	29

BAB III METODE PENELITIAN	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Definisi Konsep	33
3. Fokus Penelitian.....	33
4. Unit Analisis Data.....	34
5. <i>Key Informant</i>	34
6. Jenis dan Sumber Data.....	34
7. Teknik Pengumpulan Data.....	34
8. Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	37
1. Gambaran Umum Kota Prabumulih	37
1. Visi dan Misi Kota Prabumulih	37
2. Keadaan Geografis, Tofografi dan Kondisi Demografi.....	38
3. Pemerintahan.....	39
4. Infrastruktur	41
5. Pertambangan dan Migas.....	42
2. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	42
3. Visi dan Misi.....	43
4. Struktur Organisasi	45
5. Tanaman Pangan.....	46
6. Hortikultura.....	46
7. Perkebunan.....	46
8. Peternakan.....	48
9. Perikanan.....	49
BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA	50
3. Deskripsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)	50
1. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)	50
2. Kegunaan dan Manfaat Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)	54
3. Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Pertanggungjawaban Hasil Laporan Keuangan	64
4. Analisis Akuntabilitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)	

pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pememrintah Kota Prabumulih.....	69
1 Dimensi Integritas Keuangan.....	70
2 Dimensi Pengungkapan Laporan Keuangan.....	77
3 Dimensi Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan.....	80
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	88
2 Kesimpulan	88
3 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2012 – 2013	5
Tabel 2. Matriks Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. Fokus Penelitian	33
Tabel 4. Pembagian Kecamatan Kota Prabumulih.....	37
Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Rata – Rata Penduduk Kota Prabumulih.....	39
Tabel 6. Perangkat Daerah Kota Prabumulih	40
Tabel 7. Produksi Bahan Tambang dan Galian di Kota Prabumulih.....	42
Tabel 8. Penggunaan Lahan dalam Wilayah Kota Prabumulih.....	43
Tabel 9. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Karet Rakyat	47
Tabel 10. Luas Areal Sektor Perkebunan Dilihat dari Luas Areal dan Produksi Perkebunan.....	47
Tabel 11. Data Populasi Ternak Menurut Jenisnya Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Kota Prabumulih	48
Tabel 12. Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kota Prabumulih 2011	49
Tabel 13. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012	51
Tabel 14. Rincian Kegiatan dari Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	52
Tabel 15. Rincian Kegiatan dari Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2012	63
Tabel 16. Laporan Progres Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pengendalian Organisme Pengganggu (OPT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2012.....	66
Tabel 17. Laporan Progres Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)	67
Tabel 18. Data Hasil Penelitian	68
Tabel 19. Gambaran tentang Alokasi Dana.....	71
Tabel 20. Gambaran tentang Alokasi Dana.....	74
Tabel 21. Rincian Kegiatan dari Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	74
Tabel 22. Rincian Kegiatan dari Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2012	76
Tabel 23. Gambaran tentang Alokasi Dana.....	78
Tabel 24. Gambaran tentang Alokasi Dana.....	81
Tabel 25. Gambaran tentang Alokasi Dana.....	83
Tabel 26. Laporan Progres Kegiatan	85
Tabel 27. Data Hasil Analisis	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	28
Gambar 2. Struktur Organisasi	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia: Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
- Lampiran 2. Peraturan Menteri Keuangan: Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau
- Lampiran 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia: Alokasi Definitif Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012
- Lampiran 4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Tahun 2012 - 2013
- Lampiran 5. Surat Pengantar dan Laporan Progres Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Tahun 2012

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DBH CHT	: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
DBH SDA	: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
LAN	: Lembaga Asministrasi Negara
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
RJPM	: Rencana Jangka Panjang dan Menengah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Prabumulih merupakan kota baru, yang dibentuk berdasarkan Undang – undang nomor 6 tahun 2001. Pada tahun 2007, kota Prabumulih terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2007 yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan. Dalam Visi Kota Prabumulih kondisi masyarakat yang menguasai ilmu, pengetahuan, keterampilan dan moralitas yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana berbasis dari berbagai sumber lokal maupun non lokal, untuk mencapai tujuan pembangunan dengan dilandasi strategi pemerataan, pertumbuhan, keserasian dan keseimbangan, interkoneksi serta dinamis.

Dilihat dari sisi pembangunan pertanian, pembangunan pertanian mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya. Pembangunan pertanian sangat berperan dalam peningkatan pendapatan dan devisa, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta menjaga kelestarian lingkungan. Faktor penentu yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan pertanian antara lain penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan pertanian secara menyeluruh. Arah pembangunan pertanian di Kota Prabumulih adalah peningkatan pengembangan komoditi pertanian untuk mempercepat pengembangan agro industri serta peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, yang tercakup dalam APBD dan merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan dari APBD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka dana yang dihasilkan oleh hasil pendapatan daerah dikirim ke Pemerintah Pusat. Dimana dana tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat untuk dijadikan anggaran yang ditransfer kembali ke daerah – daerah, untuk dialokasikan demi kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Di dalam jenis Anggaran Transfer ke Daerah meliputi Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil meliputi tiga spesifikasi, diantaranya : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA).

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil, yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil 1 tembakau. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah sebesar 2 persen dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan pembagiannya diatur oleh daerah. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibagikan dengan komposisi, 30 persen untuk Provinsi, 40 persen untuk Kabupaten/Kota daerah penghasil, dan 30 persen untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Kota Prabumulih memiliki letak yang sangat strategis karena berada di tengah – tengah provinsi Sumatera Selatan yang merupakan perlintasan antar daerah disekitarnya, Pemerintah Kota Prabumulih telah melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan pertanian, secara umum sub sektor yang paling menonjol adalah Bidang Perkebunan Rakyat, Tanaman Pangan & Hortikultura, Peternakan disamping sektor Perikanan dan Kehutanan.

Kota Prabumulih sebagai kota transit yang terletak di jalur barat lintas Sumatera tergolong sebagai daerah perdagangan dan jasa. Meskipun begitu sektor pertanian tetap member kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi Kota Prabumulih, yaitu sebesar 8,16 persen dengan nominal sebesar 279.938 juta rupiah. Cakupan kegiatan pertanian yang ada di Kota Prabumulih terdiri atas beberapa sub sektor yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, perkebunan, Perternakan dan Perikanan.

Kota Prabumulih bukan merupakan Kota penghasil tembakau karena iklim yang tidak memadai untuk perkebunan tembakau. Penghasil utama Kota Prabumulih adalah karet karena mayoritas petani kota prabumulih adalah petani pekebun yaitu petani karet. Meskipun begitu pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tetap diberikan kepada daerah – daerah yang bukan penghasil, salah satunya Kota Prabumulih.

Namun demikian, daerah – daerah yang bukan penghasil selalu mengalami kesulitan dalam pengolahan alokasi dana yang diberikan, karena keputusan dari sumber keuangan pusat yang menyatakan bahwa penggunaan dana tersebut harus bersangkutan dengan tembakau sehubungan dengan asal dana tersebut dari pengalokasian perkebunan penghasil tembakau. Bagitupun juga sosialisasi yang diberikan ke daerah – daerah untuk fungsi penggunaan dana tersebut kurang memadai dari pusat.

Untuk melaksanakan tujuan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang menyatakan bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas bahan baku
2. Pembinaan industri

3. Pembinaan lingkungan sosial
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Berdasarkan dari peraturan tersebut yang mana dana bagi hasil cukai hasil tembakau diberikan kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk dialokasikan ke segala kegiatan yang berhubungan dengan tembakau. Sedangkan di Kota Prabumulih sendiri tidak ada perkebunan tembakau. Dengan tanggung jawab yang diberikan, akhirnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tersebut yang dialokasikan untuk Kota Prabumulih difungsikan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk membantu menunjang produksi pertanian perkebunan yaitu untuk perkebunan karet. Alasan difungsikannya dana yang diberikan terhadap perkebunan karet karena mayoritas petani karet adalah perokok tembakau. Berikut Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2012 – 2013 pada tabel 1.

Tabel 1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2012 – 2013

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Pagu Dana
1	<p>Pengendaian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)</p> <p>Bantuan sarana produksi alat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pertanian Kecil (Cangkul) - Jamur Pengendai jamur akar putih (<i>trichoderma sp.</i>) 	<p>95 buah</p> <p>1.900 buah</p>	Rp. 41.855.000,-
2	<p>Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Perkebunan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)</p> <p>Bentuk sarana produksi alat penyadapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pisau sadap - Mangkok sadap - Talang sadap - Kawat mangkok - Batu asahan - Bak pembeku - Ember <p>Pelatihan dan Bimbingan cara penyadapan yang baik</p>	<p>25 buah</p> <p>12.500 buah</p> <p>12.500 buah</p> <p>12.500 buah</p> <p>25 buah</p> <p>25 buah</p> <p>50 buah</p> <p>25 orang</p>	Rp. 40.824.769,-

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2012 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

Berdasarkan tabel tersebut, bahwa pengalokasian dana tidak dialokasikan untuk hal-hal yang berhubungan dengan tembakau melainkan ke kegiatan lain dalam bidang pertanian. Hal ini dikarenakan di beberapa daerah seperti Kota Prabumulih tidak

memiliki perkebunan tembakau atau dengan kata lain tidak dapat memproduksi tembakau karena keadaan daerah yang memang tidak mendukung adanya perkebunan tersebut, sehingga kesulitan bagi daerah – daerah tertentu untuk mengelola dana itu.

Kemudian dengan adanya hal tersebut, menurut keterangan Kasi bidang perkebunan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Prabumulih bahwa menteri keuangan mengadakan pertemuan dengan seluruh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disetiap daerah yang bukan daerah penghasil tembakau tetapi mendapatkan kucuran dana tersebut. Disitu diterangkan bahwa daerah tersebut memiliki kesulitan dalam mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka dana itu tidak harus dialokasikan untuk Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetapi dapat dialokasikan ke Dinas – dinas lain yang dapat berhubungan dengan tembakau. Misalnya seperti Dinas Kesehatan, yang mana Dana itu dapat difungsikan untuk alat – alat pembantu kesehatan masyarakat yang mengalami sakit akibat dari penggunaan tembakau yang berlebihan.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai ”Akuntabilitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) pada pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perhutanan Pemerintah Kota Prabumulih”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dan melihat dari judul penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

”Apakah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) pada pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pemerintah Kota Prabumulih Akuntabel ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Akuntabilitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pemerintah Kota Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, khususnya bagi kalangan akademis.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran terutama bagi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pemerintah Kota Prabumulih dalam upaya untuk lebih memantapkan dan meningkatkan penerimaan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih. 2013. *Selayang Pandang Kota Prabumulih*. Prabumulih : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- El Guyanie, Gugun. 2013. *Ironi Cukai Tembakau Karut-Marut Hukum dan Pelaksanaan DBH CHT di Indonesia*. Pakem : Indonesia Berdikari.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Inderalaya : FISIP UNSRI.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negar (LAN) RI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Moelang. J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Posdakarya.
- Nillas, Risha dan Hayatun Nufus. 2014. *Pedoman Resmi Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta : Wahyu Media.
- Sirajudin, Salleh dan Iqbal Aslam. 1995. *ACCOUNTABILITY*. Kuala Lumpur Malaysia : The Endless Prophecy, Asian and Pasific Development Centre.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sumber Lainnya :

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih tentang Rencana Kinerja Tahunan 2012.

Surat Edaran : Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-05/PK/2012 tentang Langkah – Langkah dalam Rangka Penyaluran Anggaran Transfer Ke Daerah Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2012.

PMK RI Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

Salinan PMK Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Salinan PMK Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Salinan PMK RI Nomor 197/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.